

Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tiwi Mei Listyowati^a, Anim rahmayati^b,

^{a,b}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Corresponding email: tiwimei061@gmail.com

Article information	ABSTRAK
<p>Publication Date: June 30th,2023</p> <p>Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Belanja Modal</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah, dan belanja modal terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan nonprobability sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 35 pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan 105 data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, dan Belanja Modal. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Laba atas badan usaha milik daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah</p>
<p>Keywords: Regional Own Revenue, Regional Taxes, Regional Levies, BUMD Profits, Capital Expenditures</p>	<p>ABSTRACT</p> <p>The purpose of this study is to determine the effect of local taxes, regional levies, profits of regionally owned enterprises, and capital expenditures on regional original income in district/city governments in Central Java Province in 2019-2021. The sampling technique uses nonprobability sampling. The sample used was 35 district and city governments in Central Java Province with 105 data. The data analysis technique used in this study is panel data regression. This type of research is quantitative research. The variables in this study are Local Own Revenue, Regional Retribution, BUMD Profits, and Capital Expenditures. The data used is secondary data with data collection techniques using documentation. The result of the study shows that local taxes have a positive effect on regional original income. Regional levies do not affect local revenue. Profits from regionally owned enterprises have a positive effect on local revenue. Capital expenditure has a negative effect on local revenue.</p>

Pendahuluan

Pemerintah tentunya memerlukan anggaran untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Pemerintah juga memerlukan anggaran untuk melaksanakan pembiayaan untuk memperbaiki suatu negara agar lebih berkembang. Pemerintah dalam menjalankan suatu anggaran tentunya memerlukan suatu bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan akuntansi pemerintahan untuk dapat menjalankan anggaran sehingga bisa merealisasikannya dengan baik. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang dihadapi oleh pemerintah menjadikan akuntansi pemerintah sebagai suatu yang penting untuk memenuhi kebutuhan. (Nordiawan dkk:2009)

Sistem pemerintahan di Indonesia yang dulunya menggunakan sistem sentralisasi sekarang di ubah menjadi desentralisasi yang diubah sejak tahun 2001. Perubahan yang dilakukan Pemerintah memberikan Pemerintah daerah kekuasaan untuk mengurus dan menggali sendiri potensi yang berada di daerah tersebut. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 (dalam Nordiawan dkk:2009) tentang pemerintah daerah pasal 155, belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jadi dalam hal ini dapat di ketahui bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri dengan menggunakan dana pemasukan dari pendapatan asli daerah (PAD) tersebut.

Lahirnya Undang - Undang (UU) No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang sekarang di revisi menjadi Undang - Undang (UU) No 32 Tahun 2004 karena UU No 22 Tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan politik serta ketatanegaraan. Terdapat dua masalah penting dalam sistem desentralisasi di Indonesia. Yang pertama, penyebaran dan pelimpahan kekuasaan pemerintah ke segenap daerah negara. Yang kedua, Penyerasian perbedaan - perbedaan yang ada di antara daerah - daerah, pemenuhan aspirasi - aspirasi dan tuntutan daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-undang yang telah direvisi memberikan dasar yang menandakan penetapan pemberian kewenangan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab serta mendorong kemandirian daerah. Otonomi daerah memberikan kesempatan pada daerah untuk berinovasi dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan.

Salah satu unsur pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan modal yang berupa mesin-mesin, jalan raya, dan infrastruktur lainnya. Belanja modal merupakan pengeluaran yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan dapat menambah asset pemerintah yang selanjutnya dapat meningkatkan biaya pemeliharaan (Mardiasmo, 2009). Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin-mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan serta aset tetap lainnya. Aset tetap yang dimiliki merupakan salah satu akibat adanya belanja modal yang menjadi prasyarat utama dalam memberikan pelayanan public oleh pemerintah daerah. Dalam upaya menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas umum. Belanja modal yang besar menggambarkan bahwa terdapat banyaknya infrastruktur dan sarana yang di bangun oleh pemerintah daerah tersebut.

Pada suatu daerah biasa mencapai pertumbuhan ekonomi secara terus menerus dengan cara memperbaiki infrastruktur yang ada pada daerah tersebut. Dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah yang khususnya terdapat pada belanja modal diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan pendapatan perkapita. Selain hal tersebut, peningkatan belanja modal diharapkan untuk bias menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga bias meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan dapat dikembangkannya pembangunan dengan sumber alokasi modal diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam hal keuangan. Untuk mengetahui perkembangan dalam suatu daerah dapat di lihat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut sebagai tolak ukur . Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen yang penting yang dapat menggambarkan bahwa daerah tersebut dapat membiayai daerahnya sendiri.

Mengetahui bahwa Provinsi Jawa Tengah terdiri dari berbagai Kabupaten/Kota dan dari setiap daerah mempunyai potensi-potensi tersendiri untuk dapat meningkatkan PAD pada daerah tersebut. Meningkatnya PAD di Jawa Tengah dapat dipengaruhi oleh beberapa komponen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan laba badan usaha milik daerah (BUMD). Dengan meningkatnya komponen-komponen tersebut maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Apabila PAD meningkat maka suatu daerah dapat meningkatkan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur sebagai fasilitas umum untuk bisa dinikmati oleh mesyarakat daerah tersebut.

Pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1
PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021

	TAHUN	ANGGARAN (dalam Milyaran Rupiah)	REALISASI (dalam Milyaran Rupiah)	Prosentase
PAD	2019	27.422,03	28.648,04	104,47%
	2020	30.866,98	28.056,37	90,89%
	2021	29.538,30	31.611,20	107,02%

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 dalam realisasinya sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Realisasi yang dapat dicapai sebesar 104,47 persen atau sebesar Rp. 28.648,04 miliar dari anggaran yang dipatok sebesar Rp. 27.422,03 miliar. Namun, PAD di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp. 28.056,37 miliar dari anggaran yang dipatok sebesar Rp. 30.866,98 miliar. Realisasi yang tercapai sebesar 90,89 persen. Dalam hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan realisasi sebesar 13,58 persen dari tahun 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah (BUMD), dan belanja modal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu melakukan perluasan objek pajak daerah serta ditentukan dalam menentukan besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan (Samudra, 2015).

Pajak daerah bisa menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Adanya keterkaitan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu terdapat pada kepentingan yang sama yang dimiliki oleh para *stakeholder*. Menurut Ghozali dan Chariri (2014), *stakeholder* merupakan suatu kelompok maupun individu yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses untuk pencapaian tujuan dalam organisasi. *Stakeholder* dalam sektor publik dibagi menjadi dua yaitu *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal (Mardiasmo, 2009). Dalam hal ini, *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal saling mempengaruhi dalam

mencapai kemandirian daerah. Peraturan tersebut dapat menjelaskan bahwa *stakeholder teori* dapat memberikan pengaruh terhadap pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan kemandirian daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah.

Hal ini konsisten dengan penelitian Kusuma dan Wirawati (2013), Rahayu (2015), Marita dan Suardana (2016), Novitasari (2019), Saputri (2019), dan Sari (2019) bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Sumber penerimaan yang dapat digali salah satunya berupa pajak daerah yang merupakan andalan bagi daerah dan diharapkan dari sumber penerimaan tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pendapatan asli daerah (Fitriana, 2014 : 1884). Semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah, semakin rendah penerimaan pajak daerah maka akan menurunkan pendapatan asli daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2009) yang dikategorikan sebagai *stakeholder* eksternal yaitu masyarakat sebagai pengguna jasa publik dan yang dikategorikan sebagai *stakeholder* internal yaitu pemerintah daerah atau manajer publik. *Stakeholder teori* didefinisikan sebagai perusahaan bukan hanya entitas yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri tetapi juga harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi daerah dari masyarakat yang menggunakan jasa publik dikontribusikan sebagai pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan bersama.

Hal ini sejalan dengan penelitian Kusuma dan Wirawati (2013), Mentayani,dkk (2014), Putri Dan Rahayu(2015), Sunarto dan Fatimah (2016), Novitasari (2019), dan Sari (2019) bahwa dalam penerimaan retribusi daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Semakin besarnya jumlah penerimaan Retribusi Daerah maka jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga semakin meningkat. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H2 : Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Laba Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Ghozali dan Chariri (2014) *stakeholder teori* menyatakan bahwa perusahaan bukan hanya entitas yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri tetapi juga harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Sehingga dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dari hasil sebagai pelayan publik. Dengan demikian, suatu organisasi pemerintahan membutuhkan *stakeholder* untuk bisa meningkatkan kemandirian suatu daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Meiliya (2022) bahwa laba badan usaha milik daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Semakin besarnya laba yang dihasilkan oleh BUMD, maka akan menaikkan pendapatan asli daerah. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3: Laba badan usaha milik daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Belanja Modal merupakan anggaran yang dikeluarkan untuk dapat memperoleh aset tetap dan atau aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Siregar, 2014:167).

Menurut Ghozali dan Chariri (2014) teori *stakeholder* menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta aset daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, suatu organisasi pemerintahan memberikan fasilitas umum untuk bisa dimanfaatkan oleh stakeholdernya. Dalam mewujudkan kesejahteraan, suatu organisasi pemerintahan membutuhkan peran *stakeholder* untuk bisa menggunakan jasa publik yang hasilnya dikontribusikan untuk pendapatan asli daerah.

Penelitian Amrozi (2016) , hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan asli daerah pada pemerintahan

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013. Semakin besar belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan semakin meningkat. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Metode

Wilayah penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran 2019-2021. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 Pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada www.djpk.kemenkeu.go.id. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan *evIEWS*.

Hasil dan Pembahasan

Uji Pemilihan Regresi Data Panel

Regresi data panel merupakan gabungan beberapa objek yang memiliki waktu. Pada regresi data panel meliki tiga metode yaitu CEM, FEM, dan REM. Tiga metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. perlu dilakukan pemilihan model terbaik untuk di regresikan. Berikut merupakan hasil uji pemilihan model:

Table 3
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.356182	(34,66)	0.0000
Cross-section Chi-square	105.410981	34	0.0000

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai prob. **0,0000 < 0,05**, maka uji yang cocok adalah FEM (*Fixed Effect Model*).

Table 4
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.522321	4	0.0037

Sumber : Data diolah 2023

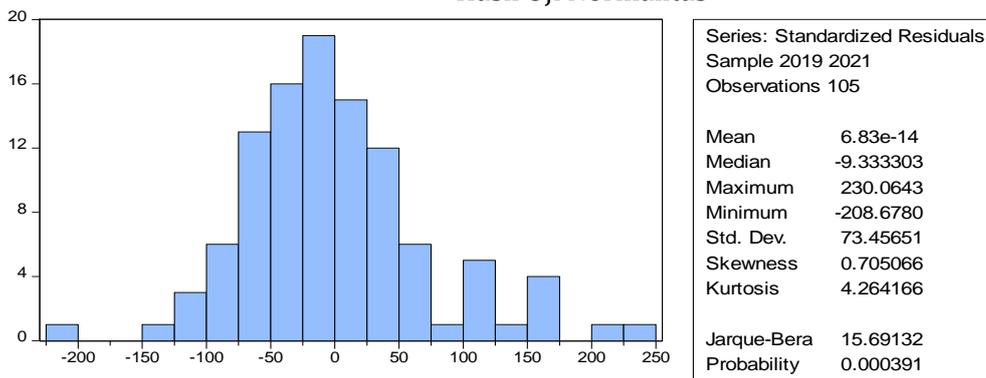
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai Prob. $0.0037 < 0,05$, maka uji yang cocok digunakan adalah **FEM (Fixed Effect Model)**. berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman maka dapat diambil kesimpulan bahwa model yang tepat untuk pengujian ini adalah FEM (*fixed Effect Model*).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data yang di gunakan berdistribusi normal, hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan uji statistik Jarque-BeraTest. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai dari probabilitasnya lebih dari 5% atau 0,05 (< 0,05). Berikut ini merupakan hasil dari uji normalitasdalam penelitian ini:

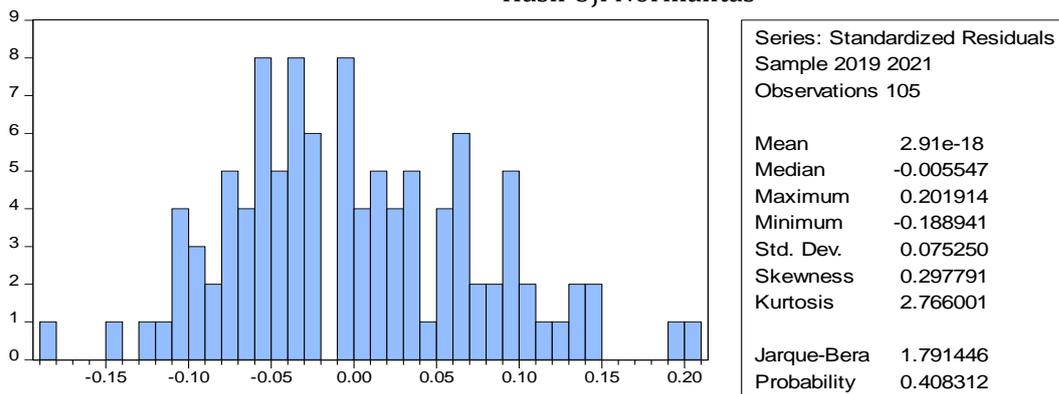
Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data diolah 2023

Pada hasil uji normalitas diatas dapat diketahui bahwa nilai jarque bera sebesar 0,000391 artinya lebih kecil dari 0,05 , sehingga dapat di simpulkan terjadi masalah normalitas, yang berarti bahwa residual data berdistribusi tidak normal. Namun setelah dilakukan perbaikan data dengan cara mentransformasi data (mengubah data dalam bentuk log), diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data diolah 2023

Pada hasil uji normalitas diatas dapat diketahui bahwa nilai jarque bera sebesar 0,408312 artinya lebih dari 0,05, maka dapat di indikasikan bahwa data sudah berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji ini dilakukan untuk menguji koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen. Berikut hasil uji multikolinieritas:

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas

	Retribusi_Daerah	Pajak_Daerah	Laba_bumd	Belanja_modal
Retribusi_Daerah	1	0.894373212737676	0.3584992338631981	0.6704870443215282
Pajak_Daerah	0.894373212737676	1	0.4689043574808741	0.6446143509408434
Laba_bumd	0.3584992338631981	0.4689043574808741	1	0.4204628913838171
Belanja_modal	0.6704870443215282	0.6446143509408434	0.4204628913838171	1

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di atas, koefisien korelasi antara masing-masing variabel $< 0,90$, sehingga tidak terdapat masalah multikolinieritas antara variabel independen. Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah korelasi antara variabel retribusi daerah (X1) dengan variabel pajak daerah (X2), memiliki koefisien korelasi yang hampir mendekati $0,90$. Namun, setelah dilakukan transformasi data menjadi log, maka diperoleh hasil uji multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinieritas

	LOG_RETRIB USI	LOG_PAJAK	LOG_LABABU MD	LOG_BELANJ AMODAL
LOG_RETRIBUSI	1.000000	0.786304	0.254547	0.502622
LOG_PAJAK	0.786304	1.000000	0.317206	0.477672
LOG_LABABUMD	0.254547	0.317206	1.000000	0.379524
LOG_BELANJAMODAL	0.502622	0.477672	0.379524	1.000000

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan hasil uji di atas, dapat diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel independen $< 0,90$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bisa diketahui dari nilai probabilitas signifikansinyadi setiap variabel. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas:

Table 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.90858	6.803112	2.485418	0.0146
RETRIBUSI_DAERAH	-0.835060	0.337559	-2.473821	0.0151
PAJAK_DAERAH	0.102496	0.023428	4.374863	0.0000
LABA_BUMD	0.040490	0.219073	0.184823	0.8537
BELANJA_MODAL	0.055015	0.020825	2.641771	0.0096
R-squared	0.412922	Mean dependent var		32.54451
Adjusted R-squared	0.389439	S.D. dependent var		30.13207
S.E. of regression	23.54471	Akaike info criterion		9.202128
Sum squared resid	55435.36	Schwarz criterion		9.328507
Log likelihood	-478.1117	Hannan-Quinn criter.		9.253339
F-statistic	17.58379	Durbin-Watson stat		1.375187
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari variabel Desentralisasi Fiskal (X1) sebesar 0,0151; (X2) sebesar 0,00000; (X3) sebesar 0,8537; (X4) sebesar 0,0096. Berdasarkan uji Glejser di atas, dapat diketahui nilai prob. Variabel retribusi daerah, pajak daerah, dan belanja modal signifikan pada 0,05 (lebih kecil dari 0,05), sehingga **mengindikasikan terdapat heteroskedastisitas. Namun apabila data ditransformasi dan dilakukan uji glejser, maka diperoleh hasil sebagai berikut :**

Table 8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

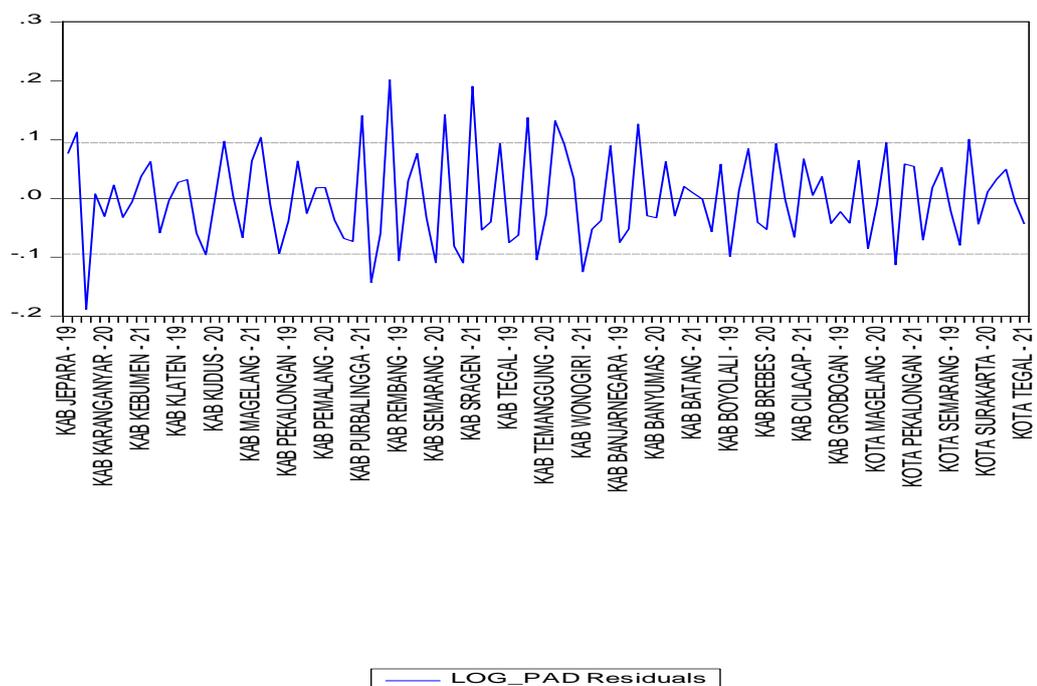
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-450.7918	144.2167	-3.125795	0.0026
LOG_RETRIBUSI	-9.240020	14.58477	-0.633539	0.5286
LOG_PAJAK	90.70073	29.06681	3.120423	0.0027
LOG_LABABUMD	9.918289	10.77700	0.920320	0.3608
LOG_BELANJAMODAL	9.521563	9.295174	1.024356	0.3094

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.735003	Mean dependent var	32.54451
Adjusted R-squared	0.582430	S.D. dependent var	30.13207
S.E. of regression	19.47125	Akaike info criterion	9.054306
Sum squared resid	25022.55	Schwarz criterion	10.04006
Log likelihood	-436.3511	Hannan-Quinn criter.	9.453754
F-statistic	4.817363	Durbin-Watson stat	2.859931

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masih terjadi heteroskedastisitas pada variabel pajak daerah, karena nilai prob. Lebih kecil dari 0,05. Namun apabila menggunakan grafik residual, diperoleh sebagai berikut :

Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan uji grafik residual tersebut, dapat diketahui bahwa titik-titik atau pola menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. (Natoen, 2018)

Uji Ketepatan Model

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model yang digunakan sudahtepat atau belum. Berikut ini hasil dari pengujian Uji F:

Tabel 9
Hasil Uji F

R-squared	0.946852
Adjusted R-squared	0.944726
S.E. of regression	74.91123
Sum squared resid	561169.3
Log likelihood	-599.6390
F-statistic	445.3817
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai prob. Dari uji F sebesar $0,0000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini sudah layak/tepat/fit.

Uji Kefisien Determinasi (*Adjusted R-Square*)

Pengujian Koefisien Determinasi dilakukan karena terdapat lebih dari satu variabel independen yang dapat dilihat melalui Adjusted R-Square. Berikut merupakan hasil dari uji koefisien determinasi:

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.946852	Mean dependent var	433.4659
Adjusted R-squared	0.944726	S.D. dependent var	318.6291
S.E. of regression	74.91123	Akaike info criterion	11.51693
Sum squared resid	561169.3	Schwarz criterion	11.64331
Log likelihood	-599.6390	Hannan-Quinn criter.	11.56814
F-statistic	445.3817	Durbin-Watson stat	0.779948
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, diperoleh nilai *Adjusted R-Square* 0,944726 (94,4726 %) yang menunjukkan bahwa PAD di pengaruhi oleh Retribusi daerah, pajak daerah, laba bumd, dan belanja modal, sedangkan sisanya di pengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Analisis Hasil Uji Regresi Data Panel

Model yang tepat dalam penelitian ini adalah model FEM yang dapat diketahui dari uji chow dan uji haussman. Hasil uji regresi data panel dalam analisis ini memperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 1.83544338629 + 0.890915351785X_1 + 0.00921553050854X_2 + 0.169784505325X_3 - 0.105904141549X_4 + e$$

Hasil regresi diatas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (a) sebesar 1,83544338629 menunjukkan bahwa apabila variable independen (X1, X2, X3, X4) bernilai 0 maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,83544338629.

2. Nilai koefisien regresi variabel Pajak Daerah (β_1) sebesar 0,890915351785 hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Pajak Daerah akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,890915351785.
3. Nilai dari koefisien variable Retribusi Daerah (β_2) sebesar 0,00921553050854 hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Retribusi Daerah akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,00921553050854.
4. Nilai koefisien regresi variabel laba badan usaha milik daerah (BUMD) (β_3) sebesar 0,169784505325 hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel laba BUMD akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,169784505325.
5. Nilai koefisien regresi variabel belanja modal (β_4) sebesar 0,105904141549 hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel belanja modal akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,105904141549.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Hipotesis menunjukkan bahwa seberapa jauh pengaruh dari variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Table 11
Hasil Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.835443	0.699641	2.623406	0.0108
LOG_RETRIBUSI	0.009216	0.070755	0.130245	0.8968
LOG_PAJAK	0.890915	0.141012	6.317994	0.0000
LOG_LABABUMD	0.169785	0.052283	3.247434	0.0018
LOG_BELANJAMODA				
L	-0.105904	0.045094	-2.348527	0.0219

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.965147	Mean dependent var	5.958464
Adjusted R-squared	0.945080	S.D. dependent var	0.403076
S.E. of regression	0.094461	Akaike info criterion	-1.602703
Sum squared resid	0.588913	Schwarz criterion	-0.616946
Log likelihood	123.1419	Hannan-Quinn criter.	-1.203255
F-statistic	48.09600	Durbin-Watson stat	2.213710
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 6,317994 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0000 ($p < 0,05$). Sehingga dalam penelitian ini

menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan secara teori berpengaruh positif. Hal ini dapat diketahui bahwa apabila terjadi kenaikan pajak daerah maka pendapatan asli daerah juga akan mengalami kenaikan. Sebaliknya apabila pajak daerah mengalami penurunan, maka pendapatan daerah juga akan menurun.

Stakeholder theory mempunyai peran penting terhadap hubungan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah. Menurut Mardiasmo (2009) *stakeholder* dibagi menjadi dua yaitu *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal. Peran-peran para *stakeholder* sangat mempengaruhi suatu organisasi pemerintahan dalam mencapai kemandirian daerah. Peran yang dimaksud yaitu manajer publik sebagai *stakeholder* internal dan masyarakat pembayar pajak dan pengguna layanan publik sebagai *stakeholder* eksternal. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa *stakeholder teori* dalam pemerintahan dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sumber-sumber PAD yang salah satunya yaitu pajak daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Wirawati (2013), Mentayani, dkk (2014), Putri dan Rahayu (2015), Mabe dan Kuusaana (2015), Marita dan Suardana (2016), Saputri (2019), Sari (2019), Rizki (2021), meiliya (2022) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dalam penelitian ini menyatakan bahwa kontribusi pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021 sebesar 20 persen.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 0,130245 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,8968 ($p > 0,05$). Sehingga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021 termasuk kedalam kategori sedang. Retribusi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat juga diwajibkan untuk membayar sesuai ketentuan pemerintah.

Menurut Ghozali dan Chariri (2014) *stakeholder teori* didefinisikan sebagai perusahaan bukan hanya entitas yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri tetapi juga harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Jadi antara perusahaan dengan *stakeholder* saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa hasil penelitian tidak sesuai dengan *stakeholder teori* yaitu retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Zahari (2016) yang menjelaskan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini terjadi karena masih kurangnya realisasi penerimaan retribusi daerah yang disebabkan oleh belum maksimalnya pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga penerimaan retribusi daerah masih kurang berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

3. Pengaruh Laba Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 3,247434 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0018 ($p > 0,05$). Sehingga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa laba badan usaha milik daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat diketahui bahwa apabila terjadi kenaikan laba badan usaha milik daerah maka pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan. Sebaliknya apabila terjadi penurunan pada laba badan usaha milik daerah maka pendapatan asli daerah juga akan mengalami penurunan.

Teori *stakeholder* menyatakan hubungan perusahaan dengan *stakeholder* harus saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Sehingga dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dari hasil sebagai pelayan publik. Dengan demikian, suatu organisasi pemerintahan membutuhkan *stakeholder* untuk bisa meningkatkan kemandirian suatu daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa laba BUMD berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021. Dalam hal ini, BUMD memberikan pelayanan kepada *stakeholder* dan *stakeholder* menerima pelayanan dengan membayar sesuai yang telah ditentukan pemerintah. Pembayaran dari *stakeholder* dikontribusikan kedalam pendapatan asli daerah kemudian digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meiliya (2022) yang menunjukkan bahwa laba badan usaha milik daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dalam penelitian ini menyatakan bahwa kontribusi laba badan usaha milik daerah (BUMD) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021 sebesar 48,57 persen.

4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar - 2,348527 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0219 ($p < 0,05$). Sehingga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli.

Menurut Ghozali dan Chariri (2014) teori *stakeholder* menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta aset daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, suatu organisasi pemerintahan memberikan fasilitas umum untuk bisa dimanfaatkan oleh *stakeholdernya*. Dalam mewujudkan kesejahteraan, suatu organisasi pemerintahan membutuhkan peran *stakeholder* untuk bisa menggunakan jasa publik yang hasilnya dikontribusikan untuk pendapatan asli daerah. Dalam hal ini, belanja modal digunakan organisasi pemerintahan untuk melakukan pembangunan fasilitas umum untuk bisa dinikmati oleh para *stakeholder*.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amrozi (2016) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dalam hal ini, belanja modal diberikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat memberikan apresiasi dalam bentuk pembayaran retribusi pemakaian jasa yang diberikan oleh pemerintah sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh belanja modal yang dilakukan belum merata di setiap daerah, sehingga pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat belum maksimal dan masyarakat tidak memberikan apresiasinya kepada pemerintah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak Daerah dan Laba BUMD berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Daftar Rujukan

- Amrozi, A. I. (2016). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur) . *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 1-12.
- Andirfa, M. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Syiah Kuala*, 30-38.
- Darmawis, R. S. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada

- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 183-199.
- E, S. (2016). Analisis Kontribusi Perusahaan Daerah Pasar terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, 166-174.
- Eka, M. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Laba BUMD terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 128-139.
- Fitriana. (2014). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bontang. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 1875-1888.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, L. (2020). Analysis of Potential Local Government Revenue Sources Towards B Local Government Revenue (PAD) of Balikpapan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Visioner*, 1607-1620.
- Indriantoro, N. (1999). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen (Ed. Ke-1)*. Yogyakarta: BPFE.
- Kusuma, K. A. (2013). Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD SeKabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(3), 574-585.
- Mardiasmo. (2001). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Meiliya, E. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Laba BUMD terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 128-139.
- Natoen, A. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7-15.
- Noerdiawan, d. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Novitasari, M. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 174-186.
- Prakosa, K. P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Ed. Revisi)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Prana, R. R. (2016). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilmuan*, 74-86.
- Ririn, T. (2014). Pengaruh Belanja Modal, Investasi, Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 36-55.
- Rostow, D. M. (1996). *Pembangunan Ekonomi Perencanaan Pembangunan. Terjemahan oleh Drs. Benyamin Molan*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Saleh, R. D. (2015). Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tengah. *Citra Ekonomi Jurnal Ekonomi*, 23-36.
- Sari, W. P. (2019). Analisa Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017). *E-Journal Equilibrium Manajemen*, 12-19.
- Siahaan. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiarto, E. (2016). Analisis Kontribusi Perusahaan Daerah Pasar terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, 166-174.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (3rd ed)*. Bandung: Alfabeta.

Zahari, M. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Universitas Batanghari*, 133-148.